

INSTITUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Erna Nisa br Purba¹, Alfa Farah²
Universitas Diponegoro^{1,2}

Abstract

Institutions are considered as a fundamental cause of long-run growth. This study empirically investigates the relationship between institutions and economic growth accross the world. The sample includes 110 countries during the years 2014 to 2019. The study specifically focuses on five measures of institutions, namely Civil Liberties, Political Rights, Corruption of Control, Political Stability, and Regulatory Quality. Using a panel data fixed effect with country and year effects, the result shows that only political stability is significant and positively associated with a higher economic growth. This implies, if a country become more politically stable, its economic growth tends to be higher.

Keywords: *Institution, Economic Growth, Fixed Effect Methods*

JEL Classification: C33, E22, O43.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi neoklasik, teori pertumbuhan eksogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan faktor-faktor produksi seperti akumulasi modal, tenaga kerja, yang disertai dengan teknologi yang bersifat eksogen. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa output yang dihasilkan tidak hanya tergantung pada tingkat modal fisik per pekerja saja tetapi juga kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang mampu menghasilkan kuantitas yang lebih banyak, menciptakan produk baru atau produk yang lebih baik, serta kemajuan teknik produksi lainnya (Mankiw, 2003).

Meski demikian, secara empiris teori pertumbuhan eksogen maupun endogen dianggap belum bisa menjelaskan secara memuaskan apa yang menyebabkan sebuah perekonomian tumbuh. Banyak program-program investasi yang dilakukan oleh beberapa negara gagal mendorong negara tersebut mencapai pertumbuhan yang diprediksikan. Salah satu contoh yang cukup populer adalah negara Ghana yang di awal kemerdekaannya melakukan investasi besar-besaran tetapi gagal mencapai tingkat perekonomian yang diprediksikan. Berkaitan dengan hal ini, Acemoglu (2005) menyebutkan bahwa inovasi, skala ekonomi, pendidikan, akumulasi modal, dan sebagainya) bukanlah penyebab fundamental pertumbuhan. Kedua ekonom tersebut berpendapat bahwa institusi adalah penyebab fundamental pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara-negara yang memiliki institusi yang baik dan efisien akan mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan lebih efisien sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat tercapai.

Acemoglu dan James A. Robinson (2012) memaparkan lebih lanjut perbedaan antara negara maju dan negara berkembang atau miskin. Negara maju memiliki struktur perekonomian dan institusi yang bersifat inklusif, yaitu institusi yang

memberikan peluang partisipasi kepada masyarakat yang seluas-luasnya serta jaminan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya melalui hak kepemilikan, kemudahan untuk berusaha, pasar yang memiliki daya saing, serta pendidikan, atau infrastruktur yang merata. Sebaliknya, negara berkembang atau miskin cenderung memiliki institusi yang bersifat ekstraktif di mana negara tersebut lebih memprioritaskan kepentingan beberapa orang atau golongan dari pada kepentingan orang banyak. Pendekatan institusi inilah yang menjelaskan secara fundamental mengapa ada perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara di dunia.

North (1990) menyebutkan bahwa hubungan institusi dan pertumbuhan ekonomi salah satunya bisa dijelaskan dengan kestabilan hak milik. Masyarakat membutuhkan jaminan untuk hak kepemilikan yang didefinisikan secara jelas. Dengan definisi kepemilikan yang jelas, alokasi dan distribusi sumber daya menjadi lebih baik serta biaya negosiasi menjadi lebih terjangkau. Dengan demikian, kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar.

Sejalan dengan itu, Easterly *et al.*, (2004) menyatakan bahwa kualitas institusi yang baik dalam suatu negara dapat menyebabkan kinerja perekonomian yang lebih baik antar negara maupun wilayah. Saat kualitas institusi diprioritaskan, kualitas institusi justru memiliki pengaruh yang lebih signifikan dari pada variabel makro ekonomi.

Hubungan institusi dan pertumbuhan ekonomi juga telah diteliti secara empiris oleh beberapa peneliti. Seperti misalnya Luciano Nakabashi dan Ana Elisa Gonçalves Pereira (2013) yang meneliti hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi di Brazil dan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas institusi mampu meningkatkan rata-rata PDB per kapita sekitar 20 persen. Selain itu, Neelum Nigar (2014) mengkaji hubungan institusi dan pertumbuhan ekonomi di 9 negara berpendapatan menengah dan rendah. Hasilnya menjelaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas institusi melalui penurunan tingkat korupsi serta pengentasan ketimpangan harus terwujud.

Penelitian ini menginvestigasi secara empiris hubungan institusi dan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah pada lima ukuran institusi, yaitu: kebebasan sipil, hak politik, batasan terhadap perilaku korupsi, kestabilan politik dan kualitas peraturan. Dengan menggunakan sampel 110 negara selama kurun waktu 2014-2019 dan metode panel data *fixed effect*, hasil estimasi menunjukkan bahwa secara umum institusi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus di antara kelima ukuran tersebut hanya kestabilan politik yang signifikan secara statistik.

TINJAUAN PUSTAKA

Model pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, tenaga kerja serta kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan berpengaruh terhadap output barang dan jasa dalam suatu negara secara keseluruhan. Di luar itu, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lain yang turut dalam mempengaruhi output nasional suatu negara, artinya pertumbuhan penduduk dan teknologi akan

berdampak pada tinggi rendahnya output per pekerja (Mankiw, 2003). Meskipun demikian, Solow belum menjelaskan dari mana sumber akumulasi modal dan teknologi tersebut.

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menjelaskan mengenai teknologi yang belum dapat dijelaskan dalam pertumbuhan eksogen. Paul Romer menyebutkan tiga faktor dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu: (1) teknologi yang bersifat endogen melalui proses ilmu pengetahuan, (2) ide-ide baru, (3) serta produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi (Arsyad, 2010).

Secara empiris teori pertumbuhan eksogen maupun endogen belum bisa menjelaskan secara memuaskan apa yang menyebabkan sebuah perekonomian tumbuh. Beberapa negara yang telah melakukan investasi ternyata gagal mencapai pertumbuhan yang diprediksikan. Negara Ghana misalnya, Ghana merupakan salah satu negara dengan tingkat investasi yang cukup besar tetapi masih gagal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah tahun 1966. Pada saat ini, Ghana masih termasuk negara miskin (Kwame Osei, 2013).

Stiglitz (2002) dalam kajiannya menyebutkan bahwa kesalahan yang dilakukan para pembuat kebijakan adalah terlalu fokus pada indikator makro saja. Stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan pemerataan memang hal yang baik tetapi tidak cukup untuk menjelaskan ketangguhan ekonomi serta perbedaan pertumbuhan yang terjadi di berbagai negara. Teori institusi hadir dengan menekankan pentingnya peran dan fungsi institusi.

Menurut North (1990), institusi merupakan aturan-aturan yang dibentuk oleh masyarakat guna membatasi perilaku masyarakat dalam usahanya memaksimalkan kekayaan atau utilitas. Lebih lanjut North (dalam Acemoglu, 2009) menekankan implikasi utama dari keberadaan institusi adalah untuk membentuk insentif dalam pertukaran baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Institusi berfungsi untuk melindungi hak individu dari tekanan atau ketidakseimbangan sosial. Selain itu, institusi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian. Adanya jaminan terhadap hak individu menjadi insentif bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang inovatif yang berguna bagi perkembangan masyarakat. Melalui kepastian ini juga masyarakat lebih mudah untuk mencapai tujuan ekonominya maupun memenuhi kebutuhannya.

Acemoglu (2009) menyebutkan beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar institusi dikategorikan menjadi institusi yang baik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karakteristik pertama adalah adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan aturan hukum yang diciptakan untuk menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap apa yang mereka miliki. Hak kepemilikan individu akan menimbulkan insentif yang dapat meningkatkan kemakmuran seorang individu.

Karakteristik kedua adalah adanya batasan perilaku bagi kalangan elite atau anggota kelompok berpengaruh lainnya. Kalangan elite atau kelompok berpengaruh yang dimaksud merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memilih institusi yang dapat meningkatkan keuntungan para kalangan elite meski seringkali membebani masyarakat. Karakteristik ketiga adalah adanya persamaan kesempatan untuk semua kalangan dan golongan di masyarakat untuk meraih kemajuan. Kesempatan yang terbuka dan diberikan kepada setiap masyarakat akan mendorong

masyarakat untuk berkembang. Semakin berkembang masyarakat maka akan semakin baik pula dampaknya bagi lingkungan masyarakat (Acemoglu, 2009).

METODE PENELITIAN

Data

Tujuan investigasi empiris dalam penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan data 110 negara dalam kurun waktu 2014-2019. Data tersebut mencakup data pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari *World Development Indicators*, ukuran institusi yang diperoleh dari *Freedom House*, dan *Worldwide Governance Indicator*. Ukuran institusi yang digunakan mencakup lima ukuran yaitu: (1) kebebasan sipil yang diukur dengan *civil liberties index*, (2) hak politik yang diukur dengan *political right index*, (3) batasan perilaku korupsi yang diukur dengan *control of corruption index*, (4) stabilitas politik yang diukur dengan indeks stabilitas politik, (5) kualitas peraturan yang diukur dengan *regulatory quality index*.

Civil liberties index (CL) menunjukkan hak kebebasan pribadi seperti hak untuk memiliki harta benda, mempertahankan diri sendiri dan untuk integritas. *Civil liberties* mendorong kebebasan masyarakat dalam perlindungan hak kepemilikan. Rentang nilai indeks kebebasan sipil agregat antara 1 sampai dengan 100. *Political right index* (PR) menunjukkan tingkat hak politik serta derajat kebebasan dalam proses pemilu, dan menunjukkan partisipasi politik. Melalui *political right* masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hak politik dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Rentang nilai indeks hak politik agregat antara 1 sampai dengan 100. *Control of corruption* (COR) menunjukkan sejauh mana sebuah negara dapat melakukan kontrol terhadap perilaku korupsi. Variabel *political stability* (POLSTAB) menunjukkan tingkat kestabilan politik dalam suatu negara. *Regulatory quality index* (RQ) menunjukkan kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, adanya peraturan yang baik untuk mengizinkan dan mempromosikan pembangunan, dan menetapkan aturan yang seragam dalam keterlibatan ekonomi. Rentang nilai *control of corruption*, *political stability*, dan *regulatory quality* antara -2,5 sampai dengan 2,5.

Statistik deskriptif dari data yang digunakan disajikan dalam tabel 1.1. Tabel statistik deskriptif menyajikan nilai *mean*, standar deviasi, *min* dan *max*. Nilai *mean* menunjukkan rata-rata dari setiap variabel penelitian. SD merupakan sebaran berdasarkan akar dari varians yang menunjukkan keragaman kelompok data. Nilai *min* menggambarkan nilai terendah dari setiap variabel penelitian dan nilai *max* menggambarkan nilai tertinggi dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1 Statistik Deskriptif untuk Beberapa Variabel Terpilih

Variabel	N	Mean	SD	Min	Max
Institusi					
<i>Civil Liberties</i> (CL)	110	37,59	15,19	9,00	60,00

<i>Political Right</i> (PR)	110	26,64	10,6	4,00	56,00
<i>Regulatory Quaity</i> (RQ)	110	0,15	0,89	-1,90	2,23
Stabilitas Politik (POLSTAB)	110	-0,10	0,89	-2,16	1,62
<i>Control of Corruption</i> (COR)	110	0,05	0,97	-1,68	2,24
Tenaga Kerja (POP)	110	1,42	1,25	-1,72	6,74
Investasi (INV)	110	1,71	9,96	-74,95	73,56

Rata-rata negara untuk variabel *Civil liberties* secara desimal sebesar 37,59, dengan nilai standar deviasi sebesar 15,19, nilai terendah sebesar 9,00 dan nilai tertinggi sebesar 60,00. Variabel *political right* (PR) memiliki rata-rata sebesar 26,64 dengan nilai minimum sebesar 4,00 dan nilai maksimum sebesar 56,00. Variabel *control of corruption* (COR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,05. Nilai minimum sebesar -1,68, dengan nilai maksimum sebesar 2,24. Rata-rata variabel *political stability* (POLSTAB) adalah sebesar -0,07, nilai minimum sebesar -2,16 dengan nilai maksimum sebesar 1,62. Terakhir variabel *regulatory quality* (RQ) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,15, nilai minimum sebesar -1,90 dan nilai maksimum sebesar 2,23. Variabel kontrol tenaga kerja (POP) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,42 dengan nilai minimum sebesar -1,72 dan nilai maksimum sebesar 6,74. Variabel investasi (INV) memiliki nilai rata-rata 1,71, dan nilai minimum sebesar -74,95, dan nilai maksimum sebesar 73,56.

Data penelitian ini dianalisis dengan analisis ekonometrika panel data *fixed effect* dengan memasukkan *country fixed effects* dan *year fixed effects*. *Fixed effects* dipilih karena variabel independen dalam model penelitian memiliki korelasi dengan *error*. Model panel data dituliskan sebagai berikut:

$$GDP_{it} = \alpha + \beta INS_{it} + \gamma_i + \theta_t + X'_{it} \partial + e_{it} \quad (1)$$

Dengan GDP_{it} adalah pertumbuhan PDB dalam persen di negara i pada tahun t . βINS_{it} adalah ukuran institusi yang diukur dengan *civil liberties index*, *political right index*, *control of corruption index*, *political stability index*, *regulatory quality index* di negara i pada tahun t . γ_i merupakan *country effect* dan θ_t merupakan *year effect*. Terakhir $X'_{it} \partial$ merupakan sekelompok variabel kontrol yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Variabel kontrol yang terdapat dalam penelitian ini meliputi populasi penduduk yang diukur dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun dalam satuan persen, investasi yang diukur dengan pertumbuhan *foreign direct investment* setiap tahun dalam satuan persen, inflasi yang diukur dengan pertumbuhan *consumer price index* setiap tahun dalam satuan persen, ekspor yang diukur dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam setahun dalam satuan persen, impor yang diukur dengan pertumbuhan impor barang dan jasa dalam setahun dalam satuan persen, dan *human capital* yang diukur dengan indeks paritas gender.

Fokus dari penelitian ini adalah mengestimasi βINS_{it} (parameter institusi). Secara umum parameter institusi (βINS_{it}) dihipotesiskan positif atau dengan kata lain

institusi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus kebebasan sipil, hak politik, batasan perilaku korupsi, stabilitas politik, dan kualitas peraturan, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi disajikan dalam tabel 1.2. Kolom (1) melaporkan hasil regresi dengan ukuran institusi kebebasan sipil, kolom (2) dengan hak politik, kolom (3) dengan batasan perilaku korupsi, kolom (4) dengan stabilitas politik, kolom (5) dengan kualitas peraturan. Regresi dilakukan dengan mengikutsertakan *country fixed effect*, *year fixed effect* dan semua variabel kontrol dalam semua kolom. Lebih lanjut *standard error* yang digunakan adalah *white robust standard error* untuk mengakomodasi residual yang heteroskedastik dan residual yang berkorelasi sepanjang waktu. Perlu disebutkan pula bahwa karena unit kerat-lintang dalam sampel relatif banyak (110 negara) sedangkan unit runtut waktu relatif sedikit (6 tahun), *serial correlation* merupakan masalah minor. Satu hal lagi yang perlu disebutkan variabel institusi diperkirakan bersifat endogen. Endogenitas ini salah satunya karena adanya kemungkinan variabel penting yang gagal dimasukkan dalam model (*omitted variable bias*). Implikasi adanya masalah endogenitas ini adalah hasil regresi tidak bisa diinterpretasikan sebagai hubungan sebab-akibat.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa institusi diukur dengan kebebasan sipil (kolom 1), hak politik (kolom 2), batasan terhadap perilaku korupsi (kolom 3), stabilitas politik (kolom 4), dan kualitas peraturan (kolom 5) memiliki tanda yang sesuai dengan hipotesis, yaitu berdampak positif. Jadi secara umum, institusi berasosiasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, diantara kelima ukuran institusi tersebut hanya kestabilan politik yang signifikan dengan tingkat signifikansi 5 persen. Angka koefisien kestabilan politik adalah sebesar 1,69. Dengan mempertimbangkan penggunaan *country fixed effect*, angka tersebut bisa diinterpretasikan sebagai: pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih tinggi sebesar 1,69 persen jika indeks kestabilan politik negara tersebut lebih tinggi sebesar 1 poin indeks, *ceteris paribus*.

Hasil analisis empiris yang menunjukkan bahwa kestabilan politik berasosiasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Alesina dkk (1994). Alesina dkk (1994) dalam penelitiannya menemukan bahwa selain perubahan pemerintahan, ketidakstabilan politik seperti demokrasi, revolusi, kudeta, dan pembunuhan karakter berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitiannya menunjukkan di negara-negara miskin cenderung memiliki sistem politik yang tidak stabil. Ketidakstabilan politik akan mengurangi pasokan modal dan tenaga kerja. Insentif masyarakat untuk menabung dan berinvestasi juga akan terhambat karena semakin meningkatnya resiko kehilangan modal dan kekacauan politik.

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Constanta</i>	3,076815 (2,174606)	2,988924 (2,174580)	3,028184 (2,173613)	2,512709 (2,156638)	2,948308 (2,169994)
<i>Civil Liberties</i>	0,000115				

	(2,174606)				
<i>Political Rights</i>		0,002430			
		(2,174580)			
<i>Control of Corruption</i>			0,690429		
			(2,173613)		
<i>Political Stability</i>				1,698492**	
				(2,156638)	
<i>Regulatory Quality</i>					1,530540
					(2,169994)
Populasi penduduk	0,508887	0,507782	0,524271**	0,496871	0,497660**
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
Investasi	0,036720	0,36707	0,037028	0,035562	0,035093
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
Inflasi	-0,104645**	-	-0,10390**	-0,098778**	-0,101164**
		0,10441**			
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
Ekspor	0,048335**	0,048412*	0,047478**	0,046838**	0,048940**
		*			
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
Impor	0,036265**	0,036193*	0,035664**	0,033294**	0,035374**
		*			
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
<i>Human Capital</i>	-0,673044	-0,644722	-0,679654	0,045841	-0,773696
	(2,174606)	(2,174580)	(2,173613)	(2,156638)	(2,169994)
<i>Country FE</i>	YA	YA	YA	YA	YA
<i>Year FE</i>	YA	YA	YA	YA	YA
R^2	0,611727	0,611736	0,612081	0,618117	0,613372
Adjusted R^2	0,524401	0,524413	0,524835	0,532228	0,526416
F-Statistic	7,005136	7,005415	7,015597	7,196750	7,053864
Obs unit	110	110	110	110	110
Obs year	6	6	6	6	6

Sumber : data diolah oleh penulis, lampiran

Note : *tingkat signifikansi 0,10, **tingkat signifikansi 0,05, ***tingkat signifikansi 0,01. Dalam tanda kurung adalah white Robust Standard Error.

KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha menjawab mengenai hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi. Institusi suatu negara yang baik dan efisien akan diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi tercipta melalui adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam hak kepemilikan, adanya batasan perilaku bagi kalangan elite atau anggota kelompok berpengaruh lainnya, serta adanya persamaan kesempatan untuk semua golongan untuk meraih kemajuan.

Analisis empiris dilakukan dengan menggunakan 110 negara dalam kurun waktu 2014-2019. Dengan menggunakan metode panel data *fixed effect*, hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum terdapat hubungan positif antara institusi dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, di antara kelima ukuran institusi yang digunakan (kebebasan sipil, hak politik, batasan perilaku korupsi, stabilitas politik, dan kualitas peraturan) hanya stabilitas politik yang signifikan. Secara khusus, dapat dikatakan jika keadaan politik suatu negara semakin stabil, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan cenderung lebih tinggi. Hasil ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Alesina dkk (1994). Penelitiannya menemukan ketidakstabilan politik akan mengurangi insentif masyarakat untuk menabung dan berinvestasi sehingga resiko kehilangan modal dan kekacauan politik semakin meningkat. Dengan demikian kestabilan politik dalam sebuah negara merupakan salah satu hal yang penting agar pertumbuhan ekonomi mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D, (2005), "*Institution is a Fundamental Cause of Long-Run Growth.*"
<http://economics.mit.edu/files/4469>
- Acemoglu, D. 2009. *Modern Economic Growth*. United Kingdom: Princeton University Press
- Acemoglu, D, James Robinson, 2012. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. United State: Crown Business
- Alesina, A., & Perotti, R. (1994). The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the Recent Literature. *The World Bank Economic Review*, 8(3), 351-371.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIK YKPN
- Easterly, W., Levine, R. and Roodma, D. (2004), "Aid, policies, and growth: comment", *American Economic Review*, Vol. 94 No. 3, pp. 774-80.
- Kwame Osai, Dr., 2013 "Why Ghana is a failed state Vol I"
<https://www.modernghana.com/news/451555/why-ghana-is-a-failed-state-vol.html> diakses 15 Mei 2021
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nakabashi Luciano Ana Elisa Gonçalves Pereira, Adolfo Sachsida (2013) "Institutions and growth: a developing country case study" *Journal of Economic Studies*, Vol. 40 No. 5, 2013 pp. 614-634
- Nigar, Neelum (2014) "The Composite Impact of Institutional Quality and Inequality on Economic Growth" *The Pakistan Development Review*, Winter 2015, Vol. 54, No. 4.
- North, D. (1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge
- North, Douglass C. and Robert Paul Thomas, (1973), *The Rise of the Western World: A New Economic History*. New York: Cambridge University Press, 1973. viii + 171 pp. ISBN: 0-521-29099-6
- Stiglitz, Joseph E., 2002, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton Company, New York.